KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Prabowo tak Ingin Sosok Penggerus Anggaran
Tanggal : Jumat, 11 Oktober 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Prabowo tak Ingin Sosok Penggerus Anggaran

Prabowo mengingatkan zaman telah berubah. Mereka yang bermain-main dengan anggaran akan cepat terlacak.

PENGGODOKAN nama-nama yang akan mengisi kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih terus dilakukan. Dalam proses itu, Prabowo dengan tegas menolak jika disodori nama dari kader partai politik (parpol) yang ditugasi untuk menggerus anggaran negara.

Presiden terpilih itu bahkan sudah meminta kepada para ketua umum parpol pendukung agar tidak menunjuk sosok kader seperti itu untuk ditawarkan masuk jajaran kabinetnya nanti.

"Terang-terangan saya katakan ke semua ketua umum, semua perwakilan, saya katakan menteri-menteri yang saudara tunjuk, di pemerintah yang saya pimpin, jangan saudara tugasi untuk cari uang dari APBN, APBD," tegas Prabowo dalam Rakornas Legislatif PKB di Jakarta, kemarin.

Ia mengingatkan zaman telah berubah. Mereka yang bermain-main dengan anggaran akan cepat terlacak. "Ini zaman digital, zaman teknologi, zaman pengamatan sangat cepat, jangan coba-coba," kata dia.

Prabowo mengakui parpol butuh uang dan sumber daya. Namun, hal itu tidak dicari dengan cara-cara negatif. "Terbuka saja kita, mari kita kelola kekayaan kita sehingga bisa mendukung semua institusi dengan baik. Kenapa tidak? Peluang ekonomi kita sangat besar," bebernya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan nomenklatur sebagian kementerian untuk kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran akan diketahui hari ini. "Mungkin sebagian (nomenklatur kementerian) sudah, sebagian belum," ujar Dasco, kemarin.

Meski demikian, kemarin, sudah beredar bocoran susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Kabarnya, kabinet mendatang bakal berjumlah 46 kementerian, sedikit lebih banyak daripada rumor yang selama ini beredar, yakni 44 kementerian.

Secara terpisah, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap komposisi menteri pada kabinet Prabowo-Gibran akan menjadi *superteam*. "Kami harapkan semuanya bisa menjadi bagian dari *superteam* yang akan beliau pimpin untuk Indonesia yang lebih maju," kata AHY di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Ia mengaku belum mengetahui secara pasti pos kementerian mana saja yang akan diisi kader Partai Demokrat. AHY akan menghormati kewenangan presiden terpilih Prabowo selaku pemegang hak prerogatif. "Kami juga tidak ingin berandai-andai. Kita akan menghormati dan menunggu apa yang menjadi keputusan final bapak presiden terpilih," ujarnya.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia Aditya Perdana menilai kabinet gemuk yang dicanangkan Prabowo lumrah untuk merealisasikan janji kampanye saat pilpres. Ia juga menyebut kabinet gemuk memang tak dapat dihindari karena Prabowo harus mengakomodasi partai pendukung dalam pilpres ditambah partai yang baru bergabung setelah pilpres.

"Presiden terpilih memiliki mandat dalam pembentukan kabinet untuk menyukseskan janji kampanye yang disampaikan dalam masa pilpres lalu. Karena itu, pertimbangan pembentukan kabinet, baik kurus ataupun gemuk, sepenuhnya berada di tangan presiden, tentu berdasarkan masukan dari mitra koalisi," kata Aditya, kemarin.

DPR sepakat 13 komisi

Terkait dengan hal itu, DPR telah sepakat menambah alat kelengkapan dewan (AKD) menjadi 13 komisi. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan penambahan AKD itu dimaksudkan kerja-kerja DPR menjadi lebih efektif menyusul rencana penambahan pos kementerian dan sejumlah badan baru pada pemerintahan mendatang.

DPR berencana mengumumkan jumlah komisi dan badan di DPR pada 14 Oktober, sebelum masa pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih dilangsungkan pada 20 Oktober. (Ykb/Faj/X-3)